

# Studi Kawasan Permukiman Kumuh Pedesaan (Dutaku) Berbasis GIS di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Fitrah Angriani, Irsyadi Siradjuddin\*, Andi Idham AP

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar

\*e-mail: irsyadi.siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

**Abstrak**—Permukiman kumuh sering dipandang sebagai kawasan yang identik dengan apatis, padat penduduk, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, tidak layak, tidak sehat, dan stigma negatif lainnya. Konsep penanganan dan penataan kawasan kumuh di pedesaan. Desa Polewali dan Desa Taccorong merepresentasikan keidentikan kumuh pedesaan. Kajian ini merupakan studi kawasan permukiman untuk menentukan level kumuh pedesaan berbasis sistem informasi geografis (GIS). Lokasi penelitian di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga bulan Oktober 2020. Pengumpulan data dengan metode observasi lapangan, survey dan telaah pustaka. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan dilakukan analisis pembobotan menurut variabel dan indikator terukur sebagaimana rumus penilaian dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kementerian PUPR. Tingkat kekumuhan permukiman kawasan kumuh berdasarkan hasil pembobotan dengan pendekatan GIS bahwa di Desa Polewali dan Desa Taccorong merupakan kumuh ringan. Nilai rata-rata pembobotan kekumuhannya adalah 2,24 dan 2,32. Penilaian pembobotan dari aspek fisik bangunan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi kependudukan, lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Konsep penanganan terhadap tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Desa Polewali dan Desa Taccorong yaitu 1. Membangun vertical housing/rumah susun, 2. Peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan permeable paving dan beton, 3. Pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan, 4. Peningkatan pelayanan air bersih lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan air, 5. Penyediaan tempat sampah disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang, dan 7. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan.

**Kata Kunci**— kumuh pedesaan; kawasan kumuh; penataan kumuh; desa polewali; desa taccorong

## I. PENDAHULUAN

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia [1].

Permukiman kumuh bisa tumbuh dari suatu permukiman yang mengalami urbanisasi, umumnya permukiman yang kepadatannya relatif tinggi, tidak memiliki struktur jaringan pelayanan yang teratur, prasarana permukiman yang minim,

bahkan di Indonesia permukiman kumuh ini tumbuh terutama karena lemahnya pengendalian dan masyarakatnya cenderung miskin [2]. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh [3].

Pembangunan perumahan baik oleh pemerintah maupun swasta berdampak pada meningkatnya intensitas lahan terbangun, bahkan lahan konservasi juga dijadikan sebagai perluasan permukiman [4]. Keberadaan permukiman sebagai tempat penduduk beraktivitas dan juga tinggal sering kali menemui berbagai permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas permukiman penduduk setempat. Salah satu isu yang masih sulit untuk dihindari dalam perkembangan wilayah di Indonesia adalah pertumbuhan permukiman kumuh. [5].

Pertumbuhan serta perkembangan perumahan dan permukiman dikawasan pedesaan beserta sarana dan prasarananya pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan lahan. Potensi lahan yang ada dalam pemanfaatannya memerlukan tata cara penanganan serta optimalisasi penggunaan yang sesuai dengan peruntukannya terutama distribusi pelayanan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan keseluruhan bagian kawasan pedesaan.

Menurut [6] menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan terjadi disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus menjadi bertambah tiap tahunnya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia serta mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim yang kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati rumah yang layak huni.

Masalah permukiman kumuh merupakan salah satu isu utama pembangunan pedesaan. Banyak hal yang menjadi penyebab terbentuknya permukiman kumuh, selain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, pola sosial dan kebiasaan mereka tinggal di kawasan kumuh, membuat

permukiman kumuh ada selalu ada [7].

Desa Polewali dengan luas 531,5 km<sup>2</sup> dan Desa Taccorong dengan luas 687,7 km<sup>2</sup> merupakan dua desa terluas di kecamatan Gantarang. Jumlah penduduk di Desa Polewali 5.163 jiwa dan Desa Taccorong 5.058 jiwa. Penggunaan lahan di Desa Polewali didominasi oleh perkebunan, sedangkan Desa Taccorong di dominasi oleh tambak. Penggunaan lahan untuk permukiman juga presentase yang significant. Presentasinya di Desa Polewali dan Desa Taccorong masing-masing 34,7% dan 28,1% [8]. Populasi penduduk yang padat dengan presentasi perumahan permukiman yang besar menyebabkan beberapa permukiman terindikasi kumuh. Permukiman kumuh sering dipandang sebagai kawasan yang identik dengan apatis, padat penduduk, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, tidak layak, tidak sehat, dan stigma negatif lainnya. Konsep penanganan dan penataan kawasan kumuh di pedesaan. Desa Polewali dan Desa Taccorong merepresentasikan keidentikan kumuh pedesaan.

Pihak aparaturnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan kecermatan dalam menentukan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan kabupaten/kota tersebut, maka dibutuhkannya suatu sistem yang dapat memudahkan untuk menginformasikan, memetakan, memonitoring dan memberikan rekomendasi pembangunan untuk suatu kabupaten/kota berupa Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk pemetaan kawasan permukiman suatu daerah.

Langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai usaha dalam menangani dan mengatasi masalah yang telah dikemukakan diatas dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan alat analisis GIS untuk pengamatan dan pengecekan objek-objek tertentu dilapangan serta pengembangan permukiman berdasarkan hasil pemetaan. Menurut [9] esensi dari perencanaan pengembangan kawasan yaitu pemanfaatan potensi ruang dengan mengintegrasikan kegiatan antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antar sektor antar dunia usaha- masyarakat, dan mengakomodasikan berbagai ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen, serta pengembangan kegiatan kawasan dan pengaturan tata ruang kawasan secara koordinatif.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan studi kawasan permukiman kumuh pedesaan Berbasis GIS di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kawasan kumuh berdasarkan hasil pemetaan dengan pendekatan ArcGIS di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. (2). Untuk membuat konsep penanganan terhadap tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan Berbasis GIS.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Polewali memiliki luas wilayah 531,45 Ha dan Desa Taccorong memiliki luas 687,64 Ha.

Waktu penelitian yang diperlukan bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah yang meliputi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam penelitian. Kegiatan tersebut seperti mencari data baik data primer maupun sekunder, serta observasi lapangan, maka waktu penelitian dilakukan dalam kurun waktu bulan Juni hingga bulan Oktober 2020.

### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasi secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pembobotan kualitas kumuh dan dianalisis dengan sistem informasi geografis. Menurut [6] melalui aplikasi SIG dapat diketahui lokasi, jarak, trend, pola dan model pada suatu area di permukaan bumi.

### C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

### D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi lapangan, metode dokumentasi dan metode telaah pustaka. Variabel penetapan kawasan kumuh dapat dilihat pada Tabel.

No.	Variabel	Indikator
1.	Kondisi lokasi	a. Legalitas tanah b. Status penguasaan bangunan c. Frekuensi bencana kebakaran d. Frekuensi bencana banjir e. Frekuensi bencana tanah longsor
2.	Kondisi kependudukan	a. Tingkat kepadatan penduduk b. Rata-rata anggota rumah tangga c. Jumlah KK per rumah/bangunan
3.	Kondisi bangunan	a. Tingkat kualitas lingkungan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Tingkat kelayakan bangunan d. Status kepemilikan tanah
4.	Kondisi sarana dan prasarana	a. Tingkat pelayanan air bersih b. Kondisi persampahan c. Kondisi saluran air hujan/drainase d. Kondisi jalan
5.	Kondisi sosial ekonomi	a. Tingkat kemiskinan b. Tingkat kepadatan c. Tingkat pendidikan d. Tingkat kerawanan keamanan

Sumber : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002).

### E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan dilakukan analisis pembobotan menurut variabel dan indikator terukur sebagaimana rumus penilaian tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) [10]. Penilaian bobot variabel menurut kategorinya yaitu :

1. Kategori Sangat Kumuh (SK) diberi skor 4,20
2. Kategori Kumuh Berat (KB) diberi skor 3,40 – 4,19
3. Kategori Kumuh Sedang (KS) diberi skor 2,60 – 3,39
4. Kategori Kumuh Ringan (KR) diberi skor 1,80 – 2,59
5. Kategori Tidak Kumuh (TK) diberi skor 1,00 – 1,79

Selanjutnya dicari tingkat rata-rata nilai menurut skor variabel masing-masing dengan persamaan (1) berikut :

$$\text{Nilai Rata-rata Kekumuhan} = \frac{\sum \text{Skor Variabel}}{\sum \text{variabel}} \quad (1)$$

Keterangan :

Skor variabel : Skor setiap variabel menurut kategori bobot yang diperoleh

Variabel : Jumlah variabel yang digunakan dalam penilaian

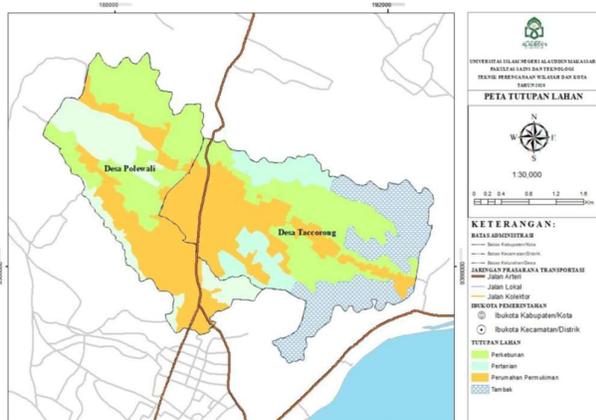
Untuk mengetahui cara penanganan kekumuhan adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi dari pengembangan Minapolitan. Kawasan permukiman dengan berbasis komunitas secara menyeluruh, dimana penekanan bertumpu pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Secara kualitatif, penentuan analisis SWOT dilakukan setelah mengetahui dan menganalisis secara deskriptif kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Analisis SWOT memberikan output berupa matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat sel atau tipe. Kemungkinan alternatif strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tingkat Kekumuhan Permukiman

Lokasi studi penelitian adalah kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Polewali memiliki luas wilayah 531,45 Ha, yang terdiri dari 6 Dusun, 11 Rukun Warga (RW), 24 Rukun Tetangga (RT) dan Desa Taccorong memiliki luas wilayah 687,64 Ha, yang terdiri dari 4 Dusun, 2 Rukun Warga (RW), 4 Rukun Tetangga (RT). Kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kondisi jalan dan drainase ada yang berfungsi dan tidak berfungsi, sumber air bersih menggunakan sumur galian dan sumur bor, rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai kuli bangunan, tukang bentor, tukang batu, pemulung, nelayan dan perantau.

Penggunaan lahan di Desa Polewali didominasi oleh perkebunan yaitu sebesar 210 Ha dengan persentase sebesar 39,5 %, sedangkan persentase terendah yaitu Sektor Pertanian sebesar 137 Ha dengan persentase sebesar 25,8 %. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan lahan Desa Polewali lebih diutamakan untuk mewadahi aktivitas sektor perkebunan.

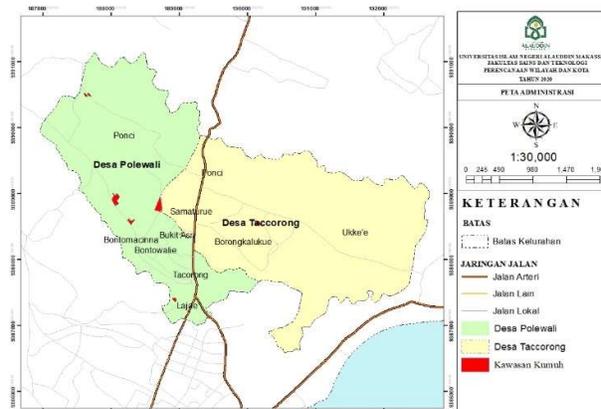


Gambar 1. Peta Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Taccorong didominasi oleh tambak yaitu sebesar 193 Ha dengan persentase sebesar 28,1%, sedangkan persentase terendah yaitu pertanian

sebesar 95 Ha dengan persentase sebesar 13,8%. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan lahan Desa Taccorong lebih diutamakan untuk mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat. Peta tutupan lahan dapat dilihat pada Gambar 1.

Jenis bangunan yang terdapat di Desa Polewali berupa rumah panggung, semi permanen, dan permanen. Dilihat dari tingkat keteraturan bangunan masih ada sekitar 119 unit rumah yang tidak teratur dari total 1.285 unit rumah. Berdasarkan survey lapangan diperoleh 152 unit rumah yang tidak permanen berdasarkan kondisi atap, dinding bambu dan lantai tanah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah kumuh sebesar 33 unit rumah.



Gambar 2. Peta Lokasi Permukiman Kumuh Pedesaan

Berdasarkan [11] Desa Polewali memiliki luas kawasan kumuh 4,08 Ha dan Desa Taccorong memiliki luas kawasan kumuh 3,14 Ha. Peta lokasi kumuh pedesaan dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis bangunan yang terdapat di Desa Taccorong berupa rumah panggung, semi permanen, dan permanen. Dilihat dari tingkat keteraturan bangunan masih ada sekitar 235 unit rumah yang tidak teratur dari total 2.055 unit rumah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan telah didapati 187 unit rumah yang tidak permanen dilihat dari kondisi atap, dinding bambu dan lantai tanah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah rumah kumuh sebesar 48 unit rumah.

Kepadatan bangunan di Desa Polewali dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah bangunan dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan bangunan di Desa Polewali yaitu 2,417 bangunan/ha. Kepadatan bangunan di Desa Taccorong dapat diketahui berdasarkan perbandingan jumlah bangunan dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan bangunan di Desa Taccorong yaitu 2,987 bangunan/ha. Menurut [12] Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim menyebabkan pembangunan yang tidak disertai dengan pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan suatu lingkungan itu kumuh.

Hasil studi kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali memiliki nilai rata-rata kekumuhan 2,24% dan Desa Taccorong dengan nilai rata-rata kekumuhan 2,32%. Hasil perhitungan analisis pembobotan skala tersebut termasuk dalam kategori Kumuh Ringan (KR) berdasarkan penilaian dari aspek fisik bangunan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi kependudukan, lokasi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut [13] Jika tidak diikuti dengan kebijakan

pemerintah maka berpotensi menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya permukiman kumuh.

Berdasarkan analisis pembobotan maka hasil penilaian tingkat kekumuhan di Desa Polewali memiliki skor 56 dengan nilai rata-rata kekumuhan 2,24 sedangkan di Desa Taccorong memiliki skor 58 dengan nilai rata-rata kekumuhan 2,32. Nilai rata-rata didapatkan dari hasil pembagian jumlah skor dengan banyaknya variabel. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa Desa Polewali Dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori Kumuh Ringan (KR). Hasil analisis pembobotan kekumuhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Pembobotan Kekumuhan

No	Variabel	Skor Desa Polewali	Skor Desa Taccorong
1.	Legalitas Tanah	3	3
2.	Status Penguasaan Bangunan	2	2
3.	Frekuensi Bencana Kebakaran	2	1
4.	Frekuensi Bencana Banjir	2	2
5.	Frekuensi Bencana Tanah Longsor	1	1
6.	Tingkat Kepadatan Bangunan	4	5
7.	Rata-rata Anggota Rumah Tangga	5	5
8.	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	5	5
9.	Angka kesakitan Malaria	1	1
10.	Angka Kesakitan Diare	1	1
11.	Angka Kesakitan Demam Berdarah	1	1
12.	Angka Kematian Kasar	1	1
13.	Status Gizi Balita	2	3
14.	Tingkat Kualitas Lingkungan	2	1
15.	Tingkat Kelayakan Bangunan	2	1
16.	Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan	5	5
17.	Tingkat pelayanan Air Bersih	2	2
18.	Kondisi Sanitasi Lingkungan	1	1
19.	Kondisi Persampahan	1	1
20.	Kondisi Saluran Air Hujan	2	2
21.	Kondisi Jalan	1	1
22.	Tingkat Kemiskinan	3	3
23.	Tingkat Pendapatan	5	4
24.	Tingkat Pendidikan	1	5
25.	Tingkat Kerawanan Keamanan	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>58</b>

**B. Analisis SWOT Desa Polewali dan Desa Taccorong**

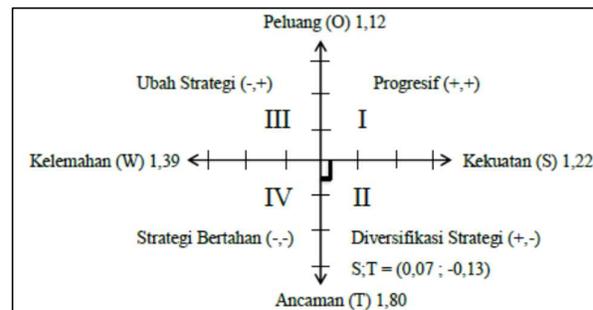
Analisis SWOT yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat memberikan penggambaran lebih lanjut mengenai upaya penanganan kekumuhan di Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Oleh karena itu ada beberapa faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan yaitu Faktor Internal Dan Faktor Eksternal.

Berdasarkan hasil dari matriks pembobotan SWOT faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal, maka hasil total perhitungan skor matriks IFAS dan EFAS adalah sebagai berikut :

- a. Total Skor Kekuatan (Strenght) = 1,22
- b. Total Skor Kelemahan (Weakness) = 1,08
- c. Total Skor Peluang (Oppportunity) = 1,12
- d. Total Skor Ancaman (Treath) = 1,39

Koordinat analisis internal pada axis X = 0,07, dan koordinat analisis eksternal pada axis Y = -0,13. Berdasarkan koordinat tersebut maka strateginya adalah Diversifikasi Strategi. Diagram cartesius analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.

Ada beberapa kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu penataan kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali dan Desa Taccorong dan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dikawasan permukiman kumuh serta penyediaan lapangan kerja. Strategi yang dipilih adalah strategi kuadran II yaitu diversifikasi strategis. Hal ini memerlukan perencanaan yang maksimal untuk meminimalisir suatu risiko yang akan dihadapi dalam suatu perencanaan.



Gambar 3. Diagram Cartesius analisis SWOT.

Berdasarkan strategi tersebut, konsep penanganan terhadap tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Desa Polewali dan Desa Taccorong yaitu 1. Membangun vertical housing/rumah susun, 2. Peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan permeable paving dan beton, 3. Pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan, 4. Peningkatan pelayanan air bersih lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan air, 5. Penyediaan tempat sampah disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang, dan 7. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan. Menurut [14] skala prioritas penanganan adalah pengelompokan permukiman kumuh kedalam berbagai klasifikasi prioritas penanganan dengan memperhatikan aspek penilaian penilaian permukiman kumuh yaitu kondisi kekumuhan, kondisi legalitas tanah/lahan dan pertimbangan lain.

Berikut detail strategi swot berdasarkan kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh serta konsep penanganan terhadap tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Desa Polewali dan Desa Taccorong.

**1. Kondisi Bangunan**

Dengan melihat kondisi kawasan yang padat dan penduduk yang banyak, maka salah satu konsep yang dapat ditawarkan yakni membangun *vertical housing*/rumah susun (Gambar 4). Menurut [15] sebagian besar bangunan di permukiman kumuh berbentuk semi permanen yang kualitasnya rendah dan dibangun dengan jarak antar satu rumah degan rumah lainnya sangat berdekatan, serta tidak direncanakan secara baik.



Gambar 4. Kondisi Eksisting dan Strategi Permukiman Rumah Susun

## 2. Kondisi Jalan

Untuk kondisi jalan dikawasan kumuh masih terdapat jaringan jalan yang masih kurang memadai. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan permeable paving dan beton (Gambar 5). Menurut [16] jika panjang jalan lingkungan kurang dari 1,5 meter, kondisi jalan lingkungan rusak dan tidak diperkeras maka nilai kekumuhan semakin besar.



Gambar 5. Eksisting jalan dan strategi pembangunan jalan

## 3. Kondisi Drainase

Untuk kondisi drainase yang berada dikawasan kumuh, kondisinya sangat tidak memadai. Adapun konsep penanganan berdasarkan permasalahan tersebut adalah pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan (Gambar 6).



Gambar 6. Eksisting drainase dan strategi pembangunan drainase

## 4. Kondisi Sumber Air Bersih

Untuk kondisi penyediaan air minum dilokasi eksisting menggunakan sumur galian. Adapun konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah peningkatan pelayanan air bersih lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan air (Gambar 7).



Gambar 7. Eksisting Sumber Air Bersih dan Strategi Pembangunan Sumber Air Bersih

## 5. Kondisi Persampahan

Kondisi pengolahan sampah masih kurang baik, terlihat banyaknya sampah yang terlihat hampir disepanjang drainase. Produksi sampah yang tinggi karena jumlah penduduk tinggi. Strateginya berupa penyediaan tempat sampah pada disetiap rumah dan blok. Kegiatan penanganan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah (Gambar 8).



Gambar 8. Eksisting Persampahan dan Strategi Pembangunan Fasilitas Persampahan

## 6. Ruang Terbuka Non Linier

Untuk kondisi ruang terbuka non linier dikawasan kumuh sudah memadai tapi belum kondusif. Adapun konsep penanganan berdasarkan permasalahan tersebut adalah melakukan penataan ulang (Gambar 9).



Gambar 9. Eksisting Ruang Terbuka Non Linear dan Strategi Pembangunan Ruang Terbuka Non Linier

## 7. Ruang Terbuka Linier

Untuk kondisi ruang terbuka linier dikawasan kumuh sudah memadai akan tetapi masih perlu penataan kembali. Adapun konsep penanganan berdasarkan permasalahan tersebut adalah melakukan penanaman pohon disepanjang jalan (Gambar 10).



Gambar 10. Eksisting Ruang Terbuka Linier dan Strategi Pembangunan Ruang Terbuka Linier

## IV. KESIMPULAN

Tingkat kekumuhan permukiman kawasan kumuh berdasarkan hasil pembobotan dengan pendekatan GIS bahwa di Desa Polewali dan Desa Taccorong merupakan kumuh ringan. Nilai rata-rata pembobotan kekumuhannya adalah 2,24 dan 2,32. Penilaian pembobotan dari aspek fisik bangunan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi kependudukan, lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Konsep penanganan untuk Desa Polewali dan Desa Taccorong adalah kerjasama bergagai pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan LSM.

Program penanganan yang direncanakan untuk menanggulangi masalah kawasan permukiman kumuh di Desa Polewali dan Desa Taccorong yaitu 1. Membangun vertical housing/ rumah susun, 2. Peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan permeable paving dan beton, 3. Pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan, 4. Peningkatan pelayanan air bersih lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan air, 5. Penyediaan tempat sampah disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang, dan 7. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Indonesia, 2011, p. 48.
- [2] R. P. Kusuma and D. Rahmawati, "Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Desa Tambak Cemandi , Kecamatan Sedati ,Kabupaten Sidoaejo," *J. Tek. ITS*, vol. 8, no. 2, pp. 144–149, 2019.
- [3] A. Hariyanto, "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus : Kota Pangkalpinang)," *J. Perenc. Wil. dan Kota UNISBA*, vol. 7, no. 2, pp. 11-37–37, 2007.
- [4] F. R. Harahap, "Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia," *Society*, vol. 1, no. 1, pp. 35–45, 2013, doi: 10.33019/society.v1i1.40.
- [5] C. D. Aguspriyanti, F. Nimita, and D. Deviana, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau," *J. Archit. Des. Dev.*, vol. 1, no. 2, p. 176, 2020, doi: 10.37253/jad.v1i2.1501.
- [6] Y. Sari, I. Siradjuddin, and A. Idham, "Studi Perkembangan Kawasan Permukiman di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa," *J. Penataan Ruang*, vol. 16, no. 1, pp. 32–36, 2021, doi: <https://dx.doi.org/10.12962/j2716179X.v16i1.8145>.
- [7] M. Lubis, L. Parinduri, A. H. Nasution, and D. Tanjung, "Penilaian Wilayah Kumuh Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara," *Semnastek Uisu*, pp. 223–228, 2021.
- [8] BPS Bulukumba, *Kecamatan Gantarang Dalam Angka 2020*. Bulukumba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2020.
- [9] I. K. Arnawa, G. A. G. E. Martiningsih, and I. M. Sukerta, "Konsep Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Gianyar," *Pros. Semnas Has. Penelit.*, vol. 0, no. 0, pp. 508–518, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/pros/article/view/337/299>.
- [10] Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, *SK Menteri tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)*. Indonesia, 2002, p. 43.
- [11] Bupati Bulukumba, *Keputusan Bupati Bulukumba tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020*. Indonesia, 2020, p. 14.
- [12] M. R. Akbar and N. Novira, "Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Denai," *Tunas Geogr.*, vol. 8, no. 1, p. 59, 2019, doi: 10.24114/tgeo.v8i1.15453.
- [13] W. I. Ervianto and S. Felasari, "Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di Perkotaan," *J. Spektran*, vol. 7, no. 2, pp. 178–186, 2019.
- [14] T. H. Tangkudung, S. Tilaar, and R. Sela, "Studi Tingkat Kekumuhan dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bollang Mongondow Selatan," *J. Spasial*, vol. 8, no. 3, pp. 468–477, 2021.
- [15] R. As'ari and S. Fadjarani, "Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan," *J. Geogr. Media Inf. Pengemb. dan Profesi Kegeografian*, vol. 15, no. 1, 2018, doi: 10.15294/jg.v15i1.11888.
- [16] S. Y. Sastanti and C. Fibriani, "Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang," *J. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 69–78, 2019, doi: 10.25077/teknosi.v5i1.2019.69-78.